



**infid**



# Quickwins dan Strategi Indonesia di G20

## Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Konteks Ketidakpastian Global

Editor : Yulius P Hermawan

Tim Riset G20 :  
Yulius P Hermawan  
Nanda Mikoprinta  
Alyssa Pratiko  
Rendyanta Indrani  
Siwi Nugraheni  
Stanislaus Risadi Apresian  
Albert Triwibowo  
Ratih Indraswari

No. Klass ..... 338.01 Q41

No. Induk ..... 142348 Tgl ..... 20.04.2017

Hadiah/Beli .....

Dari ..... Julius P. Hermawan



**infid**

## **Quickwins dan Strategi Indonesia di G20**

**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam  
Konteks Ketidakpastian Global**

**TIM RISET G20 :**

**Yulius P Hermawan  
Ivantia Mokoginta  
Rulyusa Pratikto  
Januarita Hendrani  
Siwi Nugraheni**

**Stanislaus Risadi Apresian  
Albert Triwibowo  
Ratih Indraswari**



338.01

QU1

1423 48 - R/ISB - FISIF

20.04.2017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG**

**QUICKWINS DAN STRATEGI INDONESIA DI G20**  
**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dalam Konteks Ketidakpastian Global**

Penulis : Tim Riset G20  
Editor : Yulius P Hermawan

ISBN No. 978-979-97319-5-1

**Penerbit :**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141  
Telp. (022) 2033557, Fax (022) 2035755  
Email : fisip@unpar.ac.id

**Bekerjasama dengan :**

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Cetakan Pertama, Nopember 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penerbit

*Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.*

(RPJMN 2015-2019, hal. 5-3 – 5-4)

## Kata Pengantar

Buku ini lahir dari suatu kekhawanan para peneliti kampus terhadap komitmen pemerintah untuk meningkatkan peran aktif Indonesia di forum internasional seperti G20. Kekhawanan ini muncul dari kesadaran akan tanggung jawab sosial akademisi kampus bahwa tugas 'orang kampus' bukan saja semata-mata untuk membangun teori-teori yang ilmiah dan canggih, tetapi mampu memberi dan memperkaya sumbangan pemikiran yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengemban mandat dari rakyat. Dengan demikian, akademis dapat meretas kekhawatiran terhadap '*jauhnya jarak antara teori dan praktek.*'

Sebagai bagian dari tanggungjawab sosial tersebut, Tim Kajian G20 Unpar telah melakukan kajian tentang kepentingan Indonesia di G20 dan perumusan strategi untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Pekerjaan penelitian dimulai sejak pertengahan bulan April 2015. Sejumlah dokumen resmi negara seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan sejumlah Renstra dari kementerian-kementerian dan lembaga yang menjadi *focal points* dalam agenda G20 dipelajari dengan seksama. Dokumen-dokumen yang dihasilkan G20 khususnya sejak KTT Washington di tahun 2008 ditelusuri dengan teliti. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan perwakilan-perwakilan Kementerian dan lembaga di Jakarta dan Bandung dari bulan Maret hingga Agustus 2015. Masing-masing peneliti kemudian menelaah temuan-temuan yang diperoleh, menyusunnya dalam suatu analisis yang logis dalam bingkai pemikiran konseptual yang telah dikembangkan oleh pemikir-pemikir terkemuka. Hingga kemudian lahir tulisan-tulisan analitis singkat tentang agenda dalam G20, *quickwins* Indonesia dalam agenda G20 tersebut, serta rekomendasi tentang strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk mewujudkan *quickwins* tersebut.

Tulisan-tulisan tersebut kami kompilasi dalam buku *Quickwins dan Strategi Indonesia di G20, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Indonesia dalam Konteks Ketidakpastian Global*. Harus disadari membangun kemandirian ekonomi menghadapi banyak sekali tantangan dalam konteks globalisasi dan interdependensi saat ini. Dunia juga menyaksikan betapa perekonomian dunia masih berhadapan dengan ketidakpastian, terutama sejak krisis finansial melanda Amerika Serikat di tahun 2008, dan berlanjut dengan krisis Euro terutama sejak 2010. Terus merosotnya nilai tukar rupiah menjadi indikator paling kasat mata yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil negara-negara lain.

Kami berpandangan bahwa dalam konteks ketidakpastian global ini, G20 sangatlah diperlukan, betapapun forum ini selama ini belum dapat memulihkan

target pertumbuhan ekonomi global. Forum ini menjadi forum ekonomi utama di mana setiap kepala negara/kepala pemerintahan dari negara-negara yang memiliki perekonomian sistemik berkumpul dan membahas strategi jitu untuk mengatasi kerugian akibat tingkat *vulnerabilitas* global yang sangat tinggi seperti saat ini.

Indonesia seyogyanya dapat ikut aktif dalam negosiasi-negosiasi yang dibangun dalam proses G20, dan mengambil posisi yang tepat supaya tetap dapat memanfaatkan forum tersebut untuk perwujudan kepentingan nasional Indonesia. Dengan pijakan yang kuat, Indonesia tidak akan sekedar menjadi penggembira dalam forum prestisius tersebut, ataupun terjebak dalam arus pusaran agenda negara-negara lain dalam forum tersebut. Indonesia dengan demikian tetap dapat mandiri dalam menentukan posisi dan mengambil keputusan bersama yang saling menguntungkan.

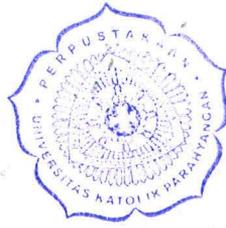
Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pihak yang telah mendukung kajian G20 ini. Pertama-tama kepada perwakilan-perwakilan kementerian yang menyediakan waktu untuk memberikan informasi, data dan berdiskusi. Kemudian, apresiasi dan terimakasih kepada INFID yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini secara penuh. Kami sampaikan juga ucapan terimakasih kepada segenap pimpinan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas. Kami harus tegaskan pula bahwa pemikiran ini tidak serta mencerminkan pendapat/cara pandang resmi lembaga-lembaga tersebut. Ini tetap menjadi pemikiran independen akademisi dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab buah karya para peneliti kampus.

Bagi para akademisi, kepuasan batin yang paling besar adalah jika pemikirannya dapat dipublikasikan, dibaca banyak orang, dan dapat menjadi bahan pemikiran dan referensi para pemangku kepentingan. Kebahagiaan itu semakin besar lagi jika karya akademik ini dapat menginspirasi diskusi-diskusi dan kajian-kajian baru di kalangan peneliti dan akademisi lainnya. Semoga demikian.

Bandung, 18 Nopember 2015

**Yulius Purwadi Hermawan**  
Koordinator Tim Kajian G20

## Daftar Isi



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	v
I. KOMPABILITAS AGENDA G20 DAN KEPENTINGAN INDONESIA <b>Yulius P Hermawan</b>	1
II. MENGKONSOLIDASIKAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN FISKAL <b>Ivantia S. Mokoginta</b>	17
III. MENINGKATKAN KINERJA PERDAGANGAN LUAR NEGERI UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI <b>Januarita Hendrani</b>	33
IV. MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS <b>Rulyusa Pratikto</b>	55
V. MENGEMBANGKAN SEKTOR ENERGI INDONESIA 2015-2019 DAN PELUANG MEMANFAATKAN FORUM G20 <b>Siwi Nugraheni</b>	69
VI. MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM FORUM G20 <b>Stanislaus Risadi Apresian</b>	78
VII. REFORMASI ADMINISTRATIF, ATURAN HUKUM DAN KOMITMEN POLITIK UNTUK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA <b>Albert Triwibowo</b>	101
VIII. MEMOBILISASI SUMBER-SUMBER DOMESTIK MELALUI PARTISIPASI DALAM BEPS DAN AEOI <b>Ratih Indraswari dan Yulius P Hermawan</b>	120

IX. MEMPERKUAT KOMPLEMENTARITAS AGENDA KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN G20 <b>Yulius P Hermawan dan Ratih Indraswari</b>	129
X. PENUTUP : MENGEJAR TARGET <i>QUICKWINS</i> MELALUI G20 <b>Yulius P Hermawan</b>	148
BIOGRAFI TIM PENYUSUN	153
PROFIL INFID	155

## PENDAHULUAN

Adalah ironi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brisbane pada bulan Nopember 2014, salah seorang menteri di kabinet Jokowi justru menyerukan agar Indonesia untuk keluar dari forum yang beranggotakan perekonomian terbesar di dunia tersebut.<sup>1</sup> Argumentasinya adalah karena dikategorikan sebagai salah satu perekonomian terbesar, Indonesia selalu menuai kerugian, terutama di sektor perikanan. Menurutnya, impor hasil perikanan dan kelautan Indonesia dibebani tariff 14 persen. Seharusnya Indonesia mendapatkan fasilitas 0 persen kalau Indonesia tidak menjadi anggota G20. Lebih baik Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara berkembang supaya pemasukan yang didapat signifikan. Sebagai contoh, ekspor ikan tuna Indonesia mencapai 700 juta dollar, tetapi karena dikenai tariff impor, pendapatan tersebut berkurang sebesar 105 juta dollar. Bila dihitung Indonesia kehilangan pendapatan sebesar 14 persen dari total impor tuna. Dari komoditas lain seperti udang, nilai kerugiannya bisa mencapai jutaan dollar. Argumentasi lain yang disampaikan adalah bahwa Indonesia juga tidak bisa menentukan keputusan di dalam G20, melainkan hanya bisa menjadi pengikut penggembira.<sup>2</sup> Menurutnya, yang bisa mengambil keputusan adalah G8, dan Indonesia bukan anggota G8.

Usulan ini tentu saja menuai kontroversi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa anggota kabinet Jokowi ternyata tidak seiring sejalan dengan keputusan yang dibuat pimpinan tertingginya. Bila dirujuk lebih ke belakang lagi, dalam visi dan misi yang disampaikan Jokowi sewaktu berkampanye sebagai calon Presiden, G20 telah disebut sebagai satu dari sedikit forum yang dipandang sangat penting bagi Indonesia untuk tampil sebagai *middle power*. Di dalam naskah tersebut tertulis bahwa Jokowi akan “meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* ... dengan memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan di G20.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “Menteri Susi Usul Indonesia Keluar dari G20,” <http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/11/12/090621332/menteri-susi-usul-indonesia-keluar-dari-g20>.

<sup>2</sup> “Menteri Susi teriak, tak ada untungnya bagi Indonesia masuk G20,” *Kompas*, 11 Nopember 2014. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/11/170347626/Menteri.Susi.Teriak.Tak.Ada.Untungnya.bagi.Indonesia.Masuk.G-20>

<sup>3</sup> Joko Widodo dan Jusuf Kalla, “Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Visi, Misi dan Program Aksi,” Jakarta, Mei 2014, [http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_Jokowi-JK.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf)

Kontroversi usulan tersebut semakin mencolok kalau kita melihat sejumlah dokumen negara seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019. Di dokumen-dokumen tersebut, tertuang sangat jelas bahwa G20 memiliki arti yang sangat strategis bagi perwujudan kepentingan nasional Indonesia.<sup>4</sup>

Namun sekalipun dipandang kontroversial, usulan Menteri tersebut barangkali mencerminkan kegalauan sebagian masyarakat tentang manfaat keanggotaan Indonesia dalam G20, dan sekaligus pula menunjukkan seberapa luas pengetahuan mereka tentang G20 sendiri. G20 adalah forum yang bersifat *high-profile* dan *prestisius*. Forum ini dipandang bergengsi karena tidak semua negara dapat bergabung di dalamnya. Indonesia adalah satu dari 193 negara anggota G20 yang terpilih. Indonesia juga merupakan satu dari empat puluh perekonomian terbesar dunia yang dapat melenggang masuk secara leluasa dalam pertemuan-pertemuan G20. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang bergabung dalam forum yang menguasai lebih dari delapan puluh persen perdagangan dunia.

Pertanyaannya menjadi relevan di sini. Apa sebenarnya yang dapat diperoleh Indonesia dari partisipasinya sebagai anggota forum utama ekonomi dunia tersebut?

Pertanyaan ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan gagasan Presiden Jokowi tentang Kabinet Kerja yang bercita-cita untuk segera menciptakan hasil kongkrit yang dapat segera dirasakan masyarakat. Presiden Jokowi seringkali menggunakan istilah "*quickwins*" atau program percepatan<sup>5</sup>, yaitu suatu hasil pembangunan yang bisa cepat dirasakan oleh masyarakat. Dalam dunia diplomasi, mantan Walikota Solo tersebut juga menekankan bahwa kehadirannya di pertemuan setingkat KTT harus membawa hasil yang nyata. Sebagai contoh, Presiden Jokowi sangat bangga ketika berhasil mencapai 12 kesepakatan dalam pertemuan KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Kesepakatan tersebut terwujud dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) *business to business*. Jokowi pun segera meminta para menterinya dan pimpinan lembaga terkait untuk menindak lanjuti kesepakatan-kesepakatan tersebut sehingga tercipta kerjasama yang nyata.<sup>6</sup> Melalui serangkaian pertemuan bilateral di forum tersebut,

---

<sup>4</sup> Lihat Renstra Kemenkeu RI 2015-2019 dan Renstra Kemenlu RI 2015-2019.

<sup>5</sup> Resty Armenia. "Istana: Jokowi-JK tak Pakai Istilah 100 hari, tetapi Quick Wins." <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150127205258-32-27801/istana-jokowi-jk-tak-pakai-istilah-100-hari-tapi-quick-wins/>

<sup>6</sup> "Ada 12 Kesepakatan yang Dibawa Jokowi dari Beijing," *Kompas*, 17 Nopember 2014. <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/06300001/Ada.12.Kesepakatan.yang.Dibawa.Jokowi.dari.Beijing>

Presiden Jokowi berhasil menyepakati rencana investasi di bidang infrastruktur seperti proyek jalan raya, rel kereta api, pembangkit listrik dan infrastruktur kemaritiman.

Buku ini lahir dari kegalauan yang sama, namun dengan perspektif yang lebih luas dan realistis. Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa bila Indonesia menerapkan strategi yang tepat, Indonesia akan mendapat peluang lebih besar untuk menikmati manfaat yang cepat dapat dirasakan masyarakat. Namun harus diakui, merumuskan strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Sama halnya, menjalankan strategi yang dipandang tepat tersebut tidak serta merta menjamin keberhasilan pencapaian target, bila tidak dilakukan oleh para pelaku diplomasi dan implementator yang handal. Di samping itu, selalu terdapat dinamika lapangan yang tidak terduga yang seringkali membutuhkan penyesuaian yang cepat dan tepat.

Melihat G20 juga perlu ditempatkan dalam perspektif yang realistis, namun tidak lantas menjadi pesimistik. G20 dan forum-forum internasional lain bukanlah “Dewa” atau “Malaikat” yang dapat menjawab setiap harapan dan kebutuhan mendesak dari semua anggotanya. G20 juga bukanlah “dokter” yang bisa memberikan resep yang “cespleng” (manjur) bagi Indonesia dan anggota-anggota lainnya. Terdapat pertarungan yang muncul akibat eksistensi G20 sebagai ajang pertarungan kepentingan dan *power* negara-negara anggota G20. Contoh yang paling dekat adalah perang mata uang yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Tidak ada negara yang menghendaki perekonomian mereka terpuruk. Segala macam cara akan ditempuh untuk menghindari keterpurukan tersebut, termasuk membuat kebijakan yang ‘dalam praktik’ ternyata berimplikasi buruk terhadap perekonomian negara lain. Devaluasi Yuan di bulan Agustus 2015 lalu adalah pilihan tersulit yang harus ditempuh Tiongkok untuk memulihkan pasar saham dan perdagangan internasionalnya yang terus turun. Nyatanya, devaluasi Yuan telah berimbas pada jatuhnya nilai mata-uang negara-negara lain. Sama halnya dengan rencana berakhirnya *Quantitative Easing* dan rencana menaikkan *interest rate* oleh Amerika Serikat telah berdampak luas bagi perekonomian dunia.

G20 bisa gagal dan gagal lagi dalam menjalankan ‘mandat’ yang diembannya. Tetapi kegagalan ini tidak langsung menjadi justifikasi yang membenarkan gagasan untuk membubarkan G20. Buku ini percaya bahwa dunia membutuhkan G20 untuk mengatasi dampak kerentanan sistemik akibat struktur interdependensi ekonomi dan politik global dalam konteks globalisasi yang sangat kuat seperti saat ini. Sekalipun legitimasi G20 sangat lemah jika dibandingkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20 merupakan pendekatan yang dipandang lebih efektif untuk membicarakan masalah-masalah kondisi ekonomi yang sangat fluktuatif saat ini. Setidaknya, G20 jauh lebih *legitimate* dibanding G7 yang selama puluhan tahun sebelumnya telah mendikte arah pembentukan tata kelola ekonomi global.

Pemerintahan Jokowi telah menempatkan G20 sebagai forum yang sangat penting di antara seratusan lebih organisasi internasional di mana Indonesia telah bergabung sebagai anggotanya.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan G20 untuk mengejar kepentingan nasional Indonesia?

Pemerintahan Jokowi telah mencanangkan sejumlah target capaian yang sangat ambisius, seperti tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Sejumlah target prioritas yang masuk kategori *quickwins* juga telah ditetapkan. Strategi domestik telah dirumuskan untuk mencapai target prioritas dalam *quickwins* tersebut. Di sejumlah bidang, target-target tersebut juga berimplikasi pada dimensi internasional. Sehingga strategi-strategi di kedua bidang tersebut mau tidak mau harus melibatkan peran diplomasi Indonesia untuk mencapai target tersebut.

Misalnya di bidang perdagangan, targetnya adalah mengurangi hambatan perdagangan dan diversifikasi mitra dagang bagi ekspor produk unggulan Indonesia. Ini dikaitkan dengan target ambisius Kementerian perdagangan untuk meningkatkan ekspor sebesar 300% hingga tahun 2015.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia harus berupaya keras menjalin interaksi dengan mitra dagang baik secara bilateral maupun multilateral seperti melalui forum World Trade Organization (WTO) untuk mewujudkan target di bidang perdagangan.

Di bidang ketenagakerjaan, target capaian *quickwin*-nya adalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, dan peningkatan daya saing. Untuk mencapai sasaran tersebut, Indonesia harus berupaya keras melobi negara-negara di mana para pekerja Indonesia dan negara-negara dengan pasar kerja potensial lain untuk mewujudkan target capaian di bidang ketenagakerjaan.

Contoh lain adalah di bidang infrastruktur. Targetnya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya anggaran pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang strategis. Untuk itu, strategi yang ditetapkan adalah menggali dana dari sektor swasta termasuk investasi dari luar negeri. Sumber potensial yang besar untuk mendanai pembangunan infrastruktur adalah dari Bank-Bank Pembangunan Multilateral (MDBs).

Buku ini adalah kajian akademik yang berangkat dari rasa tanggung jawab sosial akademisi kampus. Sebagai akademisi, kami bertugas untuk menyediakan sebanyak mungkin pemikiran. Kami percaya bahwa dengan semakin banyak gagasan akan tersedia semakin banyak pilihan kebijakan yang dapat diambil para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta dan para aktivis Civil

---

<sup>7</sup> "Pemerintah targetkan kenaikan ekspor 300 persen," <http://www.antaranews.com>, 27 Oktober 2014.

Society Organisation (CSO) dalam mendukung capaian pembangunan nasional. Dengan demikian, buku ini tidak berpretensi bahwa strategi yang dirumuskan adalah yang paling tepat. Tetapi lebih merefleksikan tekad Tim Kajian G20 Unpar untuk memperkaya “Bank Pemikiran” yang dapat diakses secara luas oleh setiap orang yang peduli terhadap masalah bangsa.

Buku ini memilih tujuh isu prioritas yang dipandang strategis bagi kepentingan Indonesia, yaitu isu Keuangan, Infrastruktur, Ketenagakerjaan, Perdagangan, Energi, Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan. Masing-masing isu tersebut, kecuali Perdagangan, telah dan sedang dibahas dalam suatu kelompok kerja khusus (Working Group) dalam G20. Isu Keuangan menjadi perhatian luas dari *Framework on Strong, Sustainable and Balanced Growth*; Isu Infrastruktur telah dibahas secara khusus dalam Study Group tentang Infrastruktur (2013) dan di bawah Presidensi Australia (2014), telah dibentuk Investment and Infrastructure Working Group (IIWG); Isu Ketenagakerjaan telah menjadi pembahasan Task Force (2013-2014) dan di bawah Presidensi Turki (2015) telah dibentuk Employment Working Group (EWG); Isu Sustainability Energi telah dibahas dalam Energy Sustainability Working Group (ESWG); isu Anti Korupsi telah menjadi perhatian Anti Corruption Working Group; dan Isu Pembangunan telah menjadi perhatian dari Development Working Group (DWG) sejak KTT Seoul di Korea (2010).

Isu Perdagangan dimasukkan di sini, sekalipun tidak ada kelompok kerja G20 yang membahas secara khusus. Ada tiga alasan penting untuk memasukan dalam kajian ini. Alasan pertama adalah pemerintah Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dan ambisius terkait dengan peningkatan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Kedua, isu ini merupakan satu isu yang juga sangat strategis sejak KTT G20 Washington dilaksanakan karena dipandang sebagai suatu pendekatan penting untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi dunia dari krisis finansial di tahun 2008. Deklarasi-deklarasi KTT G20 juga selalu menyebut komitmen untuk menghindari kebijakan proteksionisme di tengah-tengah lesunya pertumbuhan ekonomi dunia. Sejumlah pertemuan di tingkat menteri-menteri perdagangan G20 juga telah menghasilkan komunikasi yang merefleksikan betapa strategisnya peran perdagangan dalam pertumbuhan global. Ketiga, keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali yang berhasil menyepakati Paket Bali pada tahun 2013 merupakan prestasi tersendiri. Tindak lanjut Paket Bali sangatlah penting untuk menguji efektivitas proses perundingan WTO. Melalui G20, Indonesia dapat mendorong anggota-anggotanya untuk menjadi pionir dalam implementasi tersebut.

Sebagai koordinator tim kajian, saya menyampaikan terimakasih kepada para anggota tim kajian atas dedikasi mereka dalam melakukan riset dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan ini. Kepada Ketua Program Studi Ilmu

Society Organisation (CSO) dalam mendukung capaian pembangunan nasional. Dengan demikian, buku ini tidak berpretensi bahwa strategi yang dirumuskan adalah yang paling tepat. Tetapi lebih merefleksikan tekad Tim Kajian G20 Unpar untuk memperkaya “Bank Pemikiran” yang dapat diakses secara luas oleh setiap orang yang peduli terhadap masalah bangsa.

Buku ini memilih tujuh isu prioritas yang dipandang strategis bagi kepentingan Indonesia, yaitu isu Keuangan, Infrastruktur, Ketenagakerjaan, Perdagangan, Energi, Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan. Masing-masing isu tersebut, kecuali Perdagangan, telah dan sedang dibahas dalam suatu kelompok kerja khusus (Working Group) dalam G20. Isu Keuangan menjadi perhatian luas dari *Framework on Strong, Sustainable and Balanced Growth*; Isu Infrastruktur telah dibahas secara khusus dalam Study Group tentang Infrastruktur (2013) dan di bawah Presidensi Australia (2014), telah dibentuk Investment and Infrastructure Working Group (IIWG); Isu Ketenagakerjaan telah menjadi pembahasan Task Force (2013-2014) dan di bawah Presidensi Turki (2015) telah dibentuk Employment Working Group (EWG); Isu Sustainability Energi telah dibahas dalam Energy Sustainability Working Group (ESWG); isu Anti Korupsi telah menjadi perhatian Anti Corruption Working Group; dan Isu Pembangunan telah menjadi perhatian dari Development Working Group (DWG) sejak KTT Seoul di Korea (2010).

Isu Perdagangan dimasukkan di sini, sekalipun tidak ada kelompok kerja G20 yang membahas secara khusus. Ada tiga alasan penting untuk memasukan dalam kajian ini. Alasan pertama adalah pemerintah Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dan ambisius terkait dengan peningkatan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Kedua, isu ini merupakan satu isu yang juga sangat strategis sejak KTT G20 Washington dilaksanakan karena dipandang sebagai suatu pendekatan penting untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi dunia dari krisis finansial di tahun 2008. Deklarasi-deklarasi KTT G20 juga selalu menyebut komitmen untuk menghindari kebijakan proteksionisme di tengah-tengah lesunya pertumbuhan ekonomi dunia. Sejumlah pertemuan di tingkat menteri-menteri perdagangan G20 juga telah menghasilkan komunikasi yang merefleksikan betapa strategisnya peran perdagangan dalam pertumbuhan global. Ketiga, keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali yang berhasil menyepakati Paket Bali pada tahun 2013 merupakan prestasi tersendiri. Tindak lanjut Paket Bali sangatlah penting untuk menguji efektivitas proses perundingan WTO. Melalui G20, Indonesia dapat mendorong anggota-anggotanya untuk menjadi pionir dalam implementasi tersebut.

Sebagai koordinator tim kajian, saya menyampaikan terimakasih kepada para anggota tim kajian atas dedikasi mereka dalam melakukan riset dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan ini. Kepada Ketua Program Studi Ilmu

Hubungan Internasional, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, dan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dekan Fakultas Ekonomi Unpar, kami juga haturkan terimakasih atas dukungan mereka bagi anggota-anggota Tim Kajian G20 selama menjalankan riset lapangan. Terimakasih juga disampaikan kepada Falensia Noenz yang telah mengkompilasi tulisan-tulisan dan melakukan sejumlah editing atas tulisan-tulisan tersebut.

Tentu saja kami berterima-kasih yang sangat besar kepada wakil-wakil dari Kementerian-kementerian dan Lembaga-lembaga terkait yang menyediakan waktu untuk wawancara dan data-data yang diperlukan untuk kajian ini. Kami menyampaikan terimakasih secara khusus kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah memfasilitasi serangkaian pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendengar masukan-masukan terkait kepentingan dan posisi pemerintah di masing-masing isu yang menjadi perhatian prioritas kajian ini. Namun demikian, hasil kajian ini sepenuhnya adalah tanggung jawab akademis, dan tidak serta merta mencerminkan cara pandang Kementerian/Lembaga tersebut.

Kami juga sampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada INFID. Sejak tahun 2010, INFID telah memberi ruang yang tidak terbatas untuk membangun suatu dialog kritis antara komunitas kampus dan jaringan aktivis CSO yang hirau terhadap peran Indonesia di G20. Kami melihat INFID dan jaringannya telah mengambil peran penting dengan suatu perspektif *critical engagement* terhadap G20 baik di tingkat global maupun nasional. Terimakasih untuk mempublikasikan hasil kajian Tim G20 sebagai bagian dari advokasi kritis CSO terhadap peran Indonesia di G20. Buku ini menjadi bukti kesiapan CSO dan Akademisi-kampus untuk membangun kerjasama yang sinergis dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Bandung, 1 Nopember 2015

**Yulius P. Hermawan**  
Ketua Tim Kajian G20 Unpar

# I. KOMPATIBILITAS AGENDA G20 DAN KEPENTINGAN INDONESIA

Yulius P Hermawan

Harus diakui bahwa G20 adalah forum yang eksklusif dalam hal jumlah keanggotaannya, tetapi bertekad untuk menghasilkan manfaat yang bersifat inklusif yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa di dunia. Forum ini dibentuk atas dasar kesadaran bahwa koordinasi kebijakan di antara negara-negara yang memiliki perekonomian sistemik adalah suatu keharusan. Setiap negara di dunia ini telah terikat pada suatu struktur interdependensi yang sangat kuat yang membuat setiap negara sangat rentan terhadap apa yang terjadi di negara-negara lain. Krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2008 yang telah berdampak global dan devaluasi mata uang Yuan di bulan Agustus 2015 yang berdampak pada jatuhnya nilai mata uang sejumlah negara di dunia merupakan dua bukti nyata betapa 'rapuh'nya negara terhadap situasi perekonomian global.

G20 merupakan pendekatan realistik untuk merumuskan cara-cara efektif dalam menangani krisis dengan cepat. Dengan keanggotaan yang terbatas, diharapkan para pemimpin dunia dapat segera menemukan formula efektif untuk mengatasi krisis tersebut. Keanggotaan terbatas membuat forum ini bergerak cepat dalam membuat keputusan-keputusan yang strategis. Ini merupakan keunggulan suatu forum eksklusif jika dibanding dengan forum yang bersifat universal dengan keanggotaan luas.

Indonesia 'beruntung' karena telah diperhitungkan sebagai sedikit negara yang terpilih untuk bergabung dalam klub yang eksklusif tersebut. Indonesia dapat duduk bersama dengan negara-negara maju dan negara-negara berpendapatan menengah sistemik yang memiliki komitmen sama bagi pertumbuhan ekonomi global dan stabilisasi keuangan global. Namun tidak dapat dipungkiri, setiap anggota memiliki kepentingan masing-masing dan akan berupaya untuk mengedepankan perwujudan kepentingan nasionalnya melalui forum terbatas tersebut.

Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, sebagaimana dilakukan oleh anggota-anggota lain. Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa G20 memiliki nilai yang sangat strategis bagi Indonesia. G20 dapat menjadi forum untuk mengusung berbagai prioritas pembangunan nasional Indonesia yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019). Bila Indonesia cerdas, G20 dapat dimanfaatkan untuk memasukan dan membicarakan agenda-agenda prioritas yang dipandang

# I. KOMPATIBILITAS AGENDA G20 DAN KEPENTINGAN INDONESIA

Yulius P Hermawan

Harus diakui bahwa G20 adalah forum yang eksklusif dalam hal jumlah keanggotaannya, tetapi bertekad untuk menghasilkan manfaat yang bersifat inklusif yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa di dunia. Forum ini dibentuk atas dasar kesadaran bahwa koordinasi kebijakan di antara negara-negara yang memiliki perekonomian sistemik adalah suatu keharusan. Setiap negara di dunia ini telah terikat pada suatu struktur interdependensi yang sangat kuat yang membuat setiap negara sangat rentan terhadap apa yang terjadi di negara-negara lain. Krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2008 yang telah berdampak global dan devaluasi mata uang Yuan di bulan Agustus 2015 yang berdampak pada jatuhnya nilai mata uang sejumlah negara di dunia merupakan dua bukti nyata betapa 'rapuh'-nya negara terhadap situasi perekonomian global.

G20 merupakan pendekatan realistik untuk merumuskan cara-cara efektif dalam menangani krisis dengan cepat. Dengan keanggotaan yang terbatas, diharapkan para pemimpin dunia dapat segera menemukan formula efektif untuk mengatasi krisis tersebut. Keanggotaan terbatas membuat forum ini bergerak cepat dalam membuat keputusan-keputusan yang strategis. Ini merupakan keunggulan suatu forum eksklusif jika dibanding dengan forum yang bersifat universal dengan keanggotaan luas.

Indonesia 'beruntung' karena telah diperhitungkan sebagai sedikit negara yang terpilih untuk bergabung dalam klub yang eksklusif tersebut. Indonesia dapat duduk bersama dengan negara-negara maju dan negara-negara berpendapatan menengah sistemik yang memiliki komitmen sama bagi pertumbuhan ekonomi global dan stabilisasi keuangan global. Namun tidak dapat dipungkiri, setiap anggota memiliki kepentingan masing-masing dan akan berupaya untuk mengedepankan perwujudan kepentingan nasionalnya melalui forum terbatas tersebut.

Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, sebagaimana dilakukan oleh anggota-anggota lain. Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa G20 memiliki nilai yang sangat strategis bagi Indonesia. G20 dapat menjadi forum untuk mengusung berbagai prioritas pembangunan nasional Indonesia yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019). Bila Indonesia cerdas, G20 dapat dimanfaatkan untuk memasukan dan membicarakan agenda-agenda prioritas yang dipandang

sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus pula menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

Untuk itu, sangatlah penting untuk merumuskan kepentingan-kepentingan Indonesia yang dapat diperjuangkan dalam forum G20. Rumusan kepentingan-kepentingan tersebut seyogyanya menjadi pegangan para pelaku diplomasi dalam melakukan negosiasi dengan wakil-wakil dari anggota G20 lainnya. Rumusan kepentingan tersebut perlu melihat pada prioritas-prioritas yang menjadi agenda utama G20 dan perkembangan pembahasan yang terjadi di forum tersebut.

Bab pertama ini akan menganalisis kompatibilitas antara agenda G20 dan kepentingan Indonesia. Bab ini pertama-tama mengidentifikasi agenda-agenda prioritas G20 dan kepentingan-kepentingan Indonesia yang terkait erat dengan prioritas agenda G20 tersebut. Bab ini kemudian akan menyoroti kepentingan Indonesia yang realistis dan prioritas agenda G20 yang sesuai dengan kepentingan tersebut.

## 1. Prioritas-prioritas dalam G20

Ketika KTT G20 pertama kali diselenggarakan di Washington pada bulan Nopember 2008, tujuan utama G20 cenderung bersifat *ad hoc*, yaitu segera mencari cara untuk mengontrol krisis. Tiga isu utama selalu menjadi perhatian para pemimpin G20 di setiap KTT yaitu isu respon terhadap krisis, isu reformasi lembaga keuangan internasional dan isu perdagangan. Baru pada KTT ketiga di Pittsburgh (September 2009), tujuan G20 dirumuskan dengan lebih jelas dan tegas, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang. Di KTT tersebut juga ditegaskan peran G20 sebagai *premier forum for economic cooperation* (forum utama kerjasama ekonomi). Komitmen ini memberikan signal positif bahwa para pemimpin G20 berkomitmen untuk terlibat aktif dalam proses G20.

Agenda-agenda prioritas G20 telah berkembang dari waktu ke waktu sejak KTT Washington di tahun 2008. Isu-isu baru ditambahkan di KTT-KTT selanjutnya. Di KTT London (April 2009), isu ketenagakerjaan dimasukkan dalam agenda prioritas, yang kemudian terus dibahas dalam KTT-KTT selanjutnya (kecuali di KTT Seoul, Nopember 2010). Isu FSSBG dan isu Ketahanan Pangan mulai dibahas di KTT Pittsburgh (September 2009). Isu Ketahanan Energi, isu Keuangan Inklusif dan isu Pembangunan masuk dalam pembahasan di KTT Toronto (Juni 2010). Isu Pemberantasan Korupsi mendapat perhatian besar di KTT Seoul (Nopember 2010). Isu Perpajakan Internasional menjadi agenda penting dalam pembahasan KTT Cannes (Nopember 2011).

Terdapat tujuh isu prioritas G20 yang dalam tulisan ini dipandang sejalan dengan kepentingan prioritas Indonesia, yaitu: (1) Isu Keuangan dan moneter; (2) Isu Perdagangan; (3) Isu Investasi dan Infrastruktur; (4) Isu Energi yang

berkelanjutan; (5) Isu Ketenagakerjaan; (6) Isu Pemberantasan Korupsi; dan (7) Isu Pembangunan. Paparan rinci isu-isu tersebut adalah sebagai berikut.

**a. Isu Keuangan**

Isu keuangan ini selalu menjadi agenda prioritas di setiap KTT G20. G20 memiliki kepentingan bersama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi global dan sekaligus menjaga stabilitas keuangan global. Pembahasannya diarahkan untuk mencari solusi bagi krisis dan cara keluar dari krisis, dan kemudian membangun arsitektur perekonomian global yang tahan terhadap krisis serupa di masa yang akan datang.

Nyatanya, memang tidak mudah untuk mengejar target ini. Para pemimpin G20 sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat lambat. Deklarasi-deklarasi KTT G20 mencantumkan pengakuan tersebut.<sup>1</sup> Pada KTT Brisbane (Nopember 2014), para pemimpin G20 menyepakati *Comprehensive Growth Strategy* yang diharapkan dapat menjadi cara terobosan untuk mengatasi berlarut-larutnya pertumbuhan global yang cenderung lambat.<sup>2</sup> Target pertumbuhan yang ditetapkan bersifat ambisius, yaitu meningkatkan GDP kolektif lebih dari 2% dalam 5 tahun ke depan. Strategi pertumbuhan komprehensif tersebut berisikan prioritas-prioritas reformasi kebijakan struktural dalam kebijakan investasi infrastruktur, ketenagakerjaan, memperkuat perdagangan dan kompetisi yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara. Setiap anggota G20 telah menyerahkan strategi pembangunan komprehensif nasional supaya masing-masing negara dapat melihat strategi pembangunan satu sama lain. Presidensi Turki (2015) menekankan pentingnya implementasi dari Strategi Pertumbuhan Komprehensif supaya target kolektif yang telah disepakati di Brisbane dapat terwujud sesuai target waktu.<sup>3</sup>

**b. Isu Perdagangan**

Isu ini sangat terkait dengan strategi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi global. Dalam situasi ketidakpastian finansial global, perdagangan terbuka dipandang sebagai kunci untuk menjaga supaya kondisi perekonomian nasional di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi tidak semakin terpuruk. Penekanan utama dalam isu ini adalah bagaimana menjaga supaya negara-negara G20 tetap menerapkan perekonomian yang terbuka. Pasar terbuka dan liberalisasi perdagangan dipandang sebagai cara ampuh untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sekaligus mempersempit jurang kesenjangan dalam pembangunan.

Komitmen utama yang dibuat adalah menghindarkan diri dari penggunaan kebijakan proteksionis. Dalam hal ini, para pemimpin G20 bertekad untuk tidak

---

<sup>1</sup> Lihat Deklarasi-deklarasi yang dihasilkan KTT-KTT G20.

<sup>2</sup> Brisbane Summit, 15-16 November 2014

<sup>3</sup> Turkish G20 Presidency Priority for 2015. <http://G20.org>

menerapkan hambatan-hambatan perdagangan barang dan investasi. Mereka juga bertekad untuk tidak menerapkan restriksi ekspor baru, serta menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi WTO. Komitmen ini diulang-ulang lagi pada setiap KTT G20.

Di KTT Brisbane (Nopember 2015), secara khusus G20 memberi perhatian pada upaya memaksimalkan manfaat rantai nilai global dan integrasi negara-negara berkembang pada rantai nilai tersebut. Pendekatannya mencakup penurunan biaya, penyederhanaan prosedur dan penguatan jasa layanan perdagangan.<sup>4</sup> Kepresidenan Turki di tahun 2015 menambahkan pentingnya upaya bersama untuk memfasilitasi UMKM terintegrasi pada rantai nilai global.<sup>5</sup>

### c. Isu Investasi Infrastruktur

Isu infrastruktur mulai dibahas di KTT Seoul pada bulan Nopember 2011. Masalah infrastruktur dipandang sangat mendesak untuk ditangani karena dapat mendukung pemenuhan target pertumbuhan ekonomi. Fokus pembahasannya di antaranya adalah bagaimana menggali sumber-sumber pembiayaan infrastruktur dari Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dan dari sektor swasta.

Di bawah presidensi Australia, Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) dibentuk dengan tugas di antaranya untuk melakukan identifikasi terhadap seperangkat tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur, khususnya dalam kaitannya dengan strategi pertumbuhan komprehensif.<sup>6</sup> Di Australia dibentuk pula *Global Infrastructure Hub* yang akan membantu mengimplementasikan agenda pembangunan infrastruktur. Sementara di bawah presidensi Turki, G20 membahas cara-cara yang dapat dilakukan dalam penyiapan proyek infrastruktur, prioritas proyek dan pengembangan model Kerjasama Publik dan Swasta (KPS).<sup>7</sup>

### d. Isu Energi

Isu energi pertama kali dibahas dalam KTT G20 di Pittsburgh pada bulan September 2009. Para pemimpin G20 melihat bahwa akses energi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Komitmen dibuat dalam mendukung transparansi pasar, efisiensi energi dan pengamanan pasokan energi yang bersih dan terbarukan.

Di bawah presidensi Australia (2014), kemajuan penting telah dicapai dalam pembahasan isu energi, khususnya dalam sektor efisiensi energi.<sup>8</sup> Anggota-anggota G20 menyusun suatu rencana aksi efisiensi energi G20 yang mencakup

---

<sup>4</sup> G20 Priority 2014. <http://www.g20australia.org>

<sup>5</sup> G20 Presidency Priorities for 2015. <http://g20.org>

<sup>6</sup> Investment Infrastructures 2014. <http://www.g20australia.org>

<sup>7</sup> <http://www.g20.org>

<sup>8</sup> G20 Energy Action Plan 2014. <http://www.g20australia.org>

enam prioritas yaitu produk, transportasi, keuangan, akselerasi kerjasama dalam bidang-bidang pembangunan, kerjasama dalam manajemen efisiensi energi industrial, dan penghasil elektrisitas.

Akses energi juga menjadi perhatian serius G20 di bawah Presidensi Turki (2015). Pembahasan di antaranya fokus pada investasi energi terbarukan yang selama ini berbiaya tinggi dan kemungkinan menggali sumber-sumber publik dan swasta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan investasi energi.<sup>9</sup>

#### e. Isu Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan telah menjadi perhatian para pemimpin G20 khususnya sejak KTT London (April 2009). Prioritas G20 adalah bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas yang mencukupi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi tahun 2008 maupun untuk mengatasi angka pengangguran yang masih sangat tinggi di banyak negara G20.

Di KTT Brisbane (Nopember 2015), fokus pembahasannya adalah penyusunan *Employment Plan* yang berisikan komitmen seperti peningkatan kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan iklim kerja yang kondusif bagi keharmonisan hubungan industrial, peningkatan intensitas dan penegakan hukum, serta peningkatan fungsi institusi pasar tenaga kerja dan fasilitas penempatan.<sup>10</sup> Melihat pentingnya isu ketenagakerjaan, Presidensi Turki membentuk *Employment Working Group* (EWG) dengan mandat untuk membahas tiga prioritas utama, yaitu hubungan ketenagakerjaan dan pertumbuhan, *skill and quality employment*, serta monitoring.<sup>11</sup>

#### f. Isu Pemberantasan Korupsi

Isu pemberantasan korupsi merupakan prioritas G20 dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, korupsi dilihat dapat mengganggu integritas pasar dan stabilitas finansial global, serta merusak kepercayaan publik. Prioritas G20 dalam isu ini adalah mendukung lingkungan bisnis yang bersih dan bebas dari korupsi, serta mendorong negara untuk memiliki kapasitas dalam menangani tindak pidana korupsi.

Pembahasan isu ini telah menghasilkan serangkaian rencana aksi, yaitu Rencana Aksi 2010-2012 (disepakati di KTT Seoul tahun 2010), Rencana Aksi 2013-2014 (disepakati di KTT Saint Petersburg tahun 2013) dan Rencana Aksi 2015-2016 (disepakati di KTT Brisbane tahun 2014).<sup>12</sup> Pada rencana aksi terkini (2015-2016), prioritasnya meliputi meningkatkan *beneficial ownership transparency*, memberantas tindakan penyuapan dan mencegah korupsi di sektor-

---

<sup>9</sup> Turkish G20 Presidency Priorities for 2015

<sup>10</sup> G20 Member Employment Plans. <http://www.g20australia.org>

<sup>11</sup> <http://www.g20.org>

<sup>12</sup> 2015-16 G20 Anti-Corruption Plan.